

BAB III

JEJARING SOSIAL DALAM LANSKAP PEMENANGAN

POLITIK

Bab ini secara spesifik menguraikan temuan lapangan tentang berbagai jaringan yang mendukung kemenangan kontestasi kandidat perempuan. Sub-bab pertama menjelaskan perlunya segmentasi wilayah untuk mengakomodir penargetan suara. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menangani berbagai dinamika yang terjadi di medan kontestasi, termasuk pemetaan jaringan. Sub-bab kedua merincikan jaringan pemenangan Ajeng yang dibangun dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Pada awalnya, jaringan pemenangan Ajeng bertipe homogen, kemudian pada kontestasi berikutnya semakin berkembang dan heterogen. Hal ini menjadi salah satu strategi berjejaring, karena kandidat memerlukan semakin banyak suara untuk tetap bertahan di pemilihan berikutnya. Menarget suara perempuan dan kultural NU sebagai basis homososial memang sudah cukup mengamankan kursi bagi kandidat, tetapi belum cukup untuk menjamin dirinya terpilih kembali di kontestasi berikutnya yang semakin sengit.

Ajeng merupakan istri seorang kepala desa di Tegalsari Timur, Pemalang. Suaminya terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2006, sedangkan dirinya kala itu pertama kali maju menjadi caleg pada Pemilu 2009. Ajeng sendiri bukanlah warga asli Pemalang. Ia lahir di Pacitan, tumbuh besar di Pati, lalu menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di Semarang. Barulah setelah menikah dengan suaminya yang merupakan teman kampusnya itu ia pindah ke Pemalang. Ajeng dan suaminya

sama-sama menjadi bagian dari jaringan kultural NU yang aktif. Meskipun dirinya berstatus sebagai istri kepala desa, tetapi atribusi tersebut tidak mendiskreditkan kapabilitasnya sebagai politisi perempuan. Ia tetap aktif menggerakkan sendiri mesin politiknya dengan bekal pengalaman aktivisme yang telah ia tekuni sejak remaja. Inilah yang membedakannya dengan politisi-politisi perempuan lain, yang boleh jadi dengan atribusi serupa di level kabupaten dapat dikategorikan sebagai elit.

Ajeng tidak memanfaatkan statusnya sebagai aji mumpung. Terbukti, ia hanya mendapatkan 403 suara di desanya pada saat Pileg 2009, sedangkan total DPT di Tegalsari Timur kala itu berjumlah lebih dari 6.000 pemilih. Ini menandakan bahwa Ajeng tidak bisa memobilisasi jaringan dan suara suaminya di Pilkades, karena pada saat itu suaminya berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 2.317 suara.¹ Ajeng justru membangun dan merawat jaringannya di lima desa lain di Kecamatan Ampelgading, meliputi Desa Kebagusan, Jatirejo, Karangtalok, Ujunggede, dan Sidokare. Sebab, desanya merupakan basis “merah” sejak dulu. Masyarakat bahkan memiliki semboyan “*ben gepeng tetep banteng*”², yang mencerminkan loyalitas mereka terhadap PDIP. Loyalitas tersebut tumbuh dari jejak historis ideologi yang dibawa oleh banyaknya sepuh-sepuh PNI di Desa Tegalsari Timur. Bagi mereka, PDIP adalah reinkarnasi PNI. Banyak kelompok-kelompok tani dan masyarakat agraris yang menjadi loyalis merah, karena semboyan partai yang menekankan keberpihakan pada “*wong cilik*”.

¹ Wawancara dengan Sugi Hadiyanto (Kepala Desa Tegalsari Timur) pada tanggal 19 Februari 2025.

² Istilah dalam Bahasa Jawa yang artinya “biarpun diratakan (dilindas), tetap bertahan sebagai banteng (PNI; PDIP; merah)”.

Keberhasilan suami Ajeng memenangkan Pilkades Tegalsari Timur meskipun secara ideologi ia adalah NU dan cenderung dekat dengan PKB disebabkan oleh perbedaan konteks Pilkades dan Pileg. Pilkades tidak melibatkan instrumen partai, sehingga masyarakat menilai kandidat secara personal. Sedangkan Pileg, kontestasi ini memperlihatkan secara jelas afiliasi kepartaian kandidat. Informan menyampaikan hal inilah yang menjadi alasan mengapa mereka memilih suami Ajeng pada saat Pilkades, tetapi tidak memberikan suaranya untuk Ajeng ketika Pileg. Padahal, keduanya sama-sama dikenal sebagai sosok yang baik dan aktif secara sosial di lingkungan masyarakat. Ada warisan ideologi turun-temurun yang dijadikan pertimbangan bagi mereka dalam memutuskan keberpihakan kepada partai.

Perolehan suara Ajeng di Tegalsari Timur yang perlahan naik pada periode pemilu berikutnya membuktikan bahwa ia berhasil menjemput kepercayaan masyarakat melalui kinerja. Ajeng berbeda dari kecenderungan temuan lain yang menunjukkan bahwa istri kepala desa dapat memakai modalitas dan menikmati keuntungan secara instan dari jaringan serta perolehan suara suaminya. Ada proses bertahap yang harus dilalui Ajeng untuk dapat mengkapitalisasi dan memaksimalkan potensi serupa dalam kontestasinya. Sebagai politisi perempuan, ia juga bertarung dengan pandangan gender klasik di lingkungannya.

Semula, suami Ajeng sempat tidak mengizinkan dirinya maju dalam kontestasi politik. Ajeng pun ragu ketika diminta maju oleh senior-senior PKB di Kecamatan Ampelgading pada tahun 2009. Rasionalisasi PKB meminta Ajeng untuk maju adalah rekam jejaknya sebagai seorang aktivis, adanya peluang yang

terbuka melalui kuota afirmasi perempuan, dan kedekatan secara kultural dengan NU. Sebelum menjadi kepala desa, suami Ajeng merupakan bagian dari salah satu sayap PKB yang sekarang bernama Garda Bangsa. Oleh karena itu, struktural PKB melihat Ajeng sebagai potensi besar untuk menempatkan wakil di Kecamatan Ampelgading, karena sebelumnya suara PKB di wilayah ini relatif kecil. Di sisi lain, keraguan suami Ajeng dilatarbelakangi oleh dilema jabatan yang telah ia pegang. Ia khawatir konsolidasi masyarakat desanya akan kembali terpecah ketika istrinya terlibat langsung dalam politik praktis. Ajeng, yang notabene merupakan orang baru di Pemalang, juga ragu karena belum mengenal medan kontestasinya secara keseluruhan. Dirinya pun merasa segan dengan kader-kader senior lain.

Singkat cerita, bujukan yang datang hingga lima kali kepada keduanya untuk meminta Ajeng maju dalam Pileg 2009 pun berbuah kata sepakat. Dengan catatan suami Ajeng tidak ingin banyak terlibat secara langsung dalam aktivitas politik praktis demi menjaga marwahnya sebagai kepala desa. Struktural PKB menyanggupi. Mereka yang akan memfasilitasi jalannya proses kontestasi. Kala itu, sebenarnya persetujuan Ajeng untuk maju semata-mata diniatkan karena baktinya untuk NU dan hanya beranggapan untuk memenuhi kuota perempuan secara formal. Namun, pada faktanya momen ini justru menjadi titik pijak bagi Ajeng dalam mengukir karier politik secara serius sebagai politisi perempuan.

Sepenggal kilas balik perjalanan Ajeng menapaki medan kontestasinya memberi gambaran bahwa kandidat tidak bisa melangkah hanya seorang diri. Proses panjang yang dilalui mencerminkan dibutuhkan elemen modalitas yang saling terintegrasi. Meskipun ia berasal dari jalur akar rumput sekalipun, modalitas

tetap berperan penting. Kandidat tidak berangkat dengan modal serta merta nol tanpa perbekalan. Hal yang kemudian membedakan kandidat perempuan dari beragam jalur lain adalah resiliensi dan kemampuan dalam mengolah modalitasnya. Dalam konteks ini, pengalaman aktivisme akar rumput menjadi bekal yang banyak menopang proses kontestasi Ajeng. Dunia aktivisme menautkan dirinya dengan beragam akses ke jejaring. Salah satu yang paling dominan adalah jaringan kultural NU, khususnya perempuan. Jaringan inilah yang selanjutnya turut memainkan peran penting sebagai modalitas bagi kandidat. Perlahan, jaringan yang semula homogen bertransformasi menjadi semakin heterogen seiring dengan proses mobilitas vertikal yang dialami Ajeng. Ia naik kelas menduduki beragam posisi politik yang strategis, dari yang semula hanya politisi perempuan akar rumput biasa.

3.1. Segmentasi Wilayah dan Penargetan Suara

Daerah pemilihan merupakan wilayah sekaligus lahan yang perlu diolah oleh kandidat untuk memaksimalkan perolehan suaranya. Adanya dapil menjadi pembeda lingkup kontestasi antara pemilihan legislatif dengan eksekutif. Dalam hal ini, para caleg dipandang berkompetisi dengan lebih longgar karena tidak perlu memenangkan perolehan suara secara mutlak dalam suatu wilayah. Namun, kepiawaian meramu strategi para caleg sejatinya sangat diuji. Sebab, mereka bertarung dengan banyak rival, baik dari internal partai maupun partai lain untuk mendapatkan kursi. Mereka harus jeli untuk menentukan arah gerak tim sukses yang telah dibentuk. Kandidat disuguhkan beberapa opsi untuk mengoptimalkan kinerja-kinerja kemenangan: (1) fokus dalam arena yang dapat disebut basis; (2)

memeratakan distribusi suara; atau (3) menggunakan gabungan strategi (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dapil tempat Ajeng berkontestasi terdiri atas dua kecamatan, meliputi Ampelgading dan Petarukan. Kecamatan Ampelgading terbagi menjadi 16 desa, sedangkan Kecamatan Petarukan terbagi menjadi 20 desa/kelurahan. Dari dua kecamatan tersebut, Ajeng menggunakan opsi fokus dalam arena basis Ampelgading sebagai prioritas perolehan suara, utamanya di lima desa dengan basis massa Nahdliyin yang kuat. Kelima desa tersebut adalah Kebagusan, Jatirejo, Karangtalok, Ujunggede, dan Sidokare. Tegalsari Timur sebagai desa tempat tinggalnya baru bisa dijadikan sebagai basis massa setelah melewati proses konsolidasi yang lebih panjang, mengingat desanya adalah basis merah dan ada irisan posisi suaminya sebagai kepala desa yang harus dijaga. Kecamatan Petarukan tidak masuk dalam kategori lahan prioritas bagi Ajeng, sebagaimana keterangan yang ia sampaikan.

“Basis saya lebih banyak di Ampelgading. Di Petarukan itu sistemnya kan lewat MWC NU kalau saya mau masuk, jadi tidak per jamaah seperti yang saya lakukan di Fatayat dan Muslimat Kecamatan Ampelgading. Ya tetap komunikasi dengan Petarukan, cuma memang lebih leluasa di Ampelgading”.³

Keterangan serupa turut disampaikan dan diperkuat oleh informan yang berasal dari jaringan Fatayat dan Muslimat.⁴ Mereka mengungkapkan bahwa sejak pertama kali Ajeng mencalonkan diri, pendekatan kepada konstituen NU rutin dilakukan, utamanya kepada para jamaah.

³ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

⁴ Wawancara dengan Maria Ulfa (Ketua PR Fatayat NU Kebagusan) pada tanggal 5 Februari 2025.

Faktor akses ke jaringan dan koneksi menjadi latar belakang fokus penargetan suara di Kecamatan Ampelgading. Di samping itu, target semacam ini dapat mengefektifkan biaya politik bagi kandidat, karena sudah ada segmentasi khusus dan estimasi perolehan suara. Dinamika kontestasi legislatif yang menyuguhkan banyak kandidat dalam satu wilayah mengharuskan masing-masing kandidat harus pandai mengatur strategi. Sangat sulit menjangkau semua wilayah untuk menjadi lumbung suara bagi kandidat. Selain karena terbatasnya akses dan waktu, biaya politik yang dikeluarkan juga akan menjadi sangat mahal manakala kandidat tidak memiliki segmentasi massa yang jelas. Selama empat kali kontestasi, Kecamatan Ampelgading menjadi wilayah yang kenaikan suaranya konsisten bagi Ajeng. Berbeda dengan Ampelgading, perolehan suara Ajeng di Kecamatan Petarukan terlihat fluktuatif.

Tabel 3.1.

Perolehan Suara Kandidat pada Pileg 2009 – 2024 Per Kecamatan

Periode Pemilu	Perolehan Suara Per Kecamatan		Jumlah
	Ampelgading	Petarukan	
Pileg 2009	1.453	247	1.700
Pileg 2014	3.164	1.060	4.224
Pileg 2019	3.736	775	4.511
Pileg 2024	6.149	2.103	8.252

Sumber: Arsip KPU Kabupaten Pemalang & Wawancara Informan

Ajeng memang tidak menargetkan suara secara spesifik di Petarukan. Ia hanya mengandalkan koneksi seadanya, seperti dari kerabat dan teman yang ada di Petarukan, tanpa membentuk tim pemenangan yang lebih terkoordinir seperti di

Kecamatan Ampelgading. Ia fokus pada arena yang dirasa bisa disebut sebagai “lahan”. Konotasi kata “lahan” merujuk pada daerah-daerah yang secara serius masuk sebagai segmen massa bagi kandidat. Kalkulasi Ajeng dan tim melihat Kecamatan Ampelgading sebagai wilayah yang lebih potensial, karena Ajeng masih berada dalam satu lingkup wilayah tersebut. Di sisi lain, rival berat dari satu partainya lebih banyak yang berasal dari Kecamatan Petarukan. Ajeng memaknai hal tersebut sebagai salah satu strategi kemenangan untuk fokus pada lahan masing-masing sekaligus memberi kesempatan pada rival satu partai, yang notabene adalah rekan, untuk bisa memaksimalkan lumbung suaranya sendiri. Pembagian semacam ini sebenarnya juga menjadi bagian dari arahan struktural partai agar kadernya tidak berebut suara di satu wilayah atau jaringan yang sama.

“Partai pasti punya target untuk mendapat peluang kursi, sehingga tentunya target dibikin realistis. Untuk mendorong itu kami menghimbau caleg agar tidak beririsan, dalam artian menggalang dukungan di bawah. Tidak boleh dalam satu tempat jadi rebutan. Kami menyarankan untuk berbagi lah, sehingga target yang kami harapkan dapat terlaksana. Lebih kepada kita memberikan argumentasi dan hitung-hitungan peluang untuk mendapatkan target suara. Salah satu hal yang perlu dilakukan ya berbagi itu, dan rata-rata yang terjadi memang begitu. Kalau mereka beririsan di satu wilayah, justru suaranya rendah. *Nek sing ora rebutan* suaranya cenderung tinggi, seperti itu”.⁵

Arahan tersebut ditujukan partai untuk menghindari persaingan yang terlalu sengit dan konflik horizontal antar sesama kader. Sebagai partai yang identik dengan NU, PKB pun menghimbau agar jaringan kultural yang dipakai kandidat dalam satu wilayah yang sama tidak beririsan. Arahan spesifik mengenai pembagian lumbung suara dan basis jaringan memang tidak terlembaga secara

⁵ Wawancara dengan Ma'mun Riyad (Wakil Ketua DPC PKB Pemalang) pada tanggal 6 Februari 2025.

formal, tetapi lebih menitikberatkan pada kesadaran bersama dan mitigasi antar kader. Terkait dengan jaringan kultural NU, himbauan struktural PKB Pemalang kepada para kadernya membebaskan siapa saja boleh masuk, dengan mempertimbangkan kedekatan dan peluang diterima. Misalkan di Kecamatan Petarukan, karena sudah menjadi semacam tradisi bahwa dukungan MWC NU sangat berpengaruh, maka kader yang hendak masuk ke wilayah ini diutamakan yang memiliki kedekatan dengan MWC NU. Begitupun dengan Ampelgading. Realitas lapangan yang menunjukkan bahwa badan-badan otonom NU di Ampelgading tidak kalah aktif dari strukturalnya, maka kandidat seyogyanya harus terlibat atau memiliki kedekatan dengan badan otonom tersebut untuk mendapat dukungan.

Pengalaman Ajeng sebagai caleg pernah mengalami konflik horizontal sebagaimana yang dimaksud. Di tahun 2009, ia mendapat pertentangan dari sesama caleg perempuan satu partai dan satu dapil. Kala itu hal yang dipersolakan adalah selisih 40 suara yang mengakibatkan seniornya gagal lolos menjadi dewan, sedangkan ia sebagai pendatang baru justru terpilih. Senior perempuan tersebut kemudian mendatangi Ajeng dan menuduh suaminya terlibat permainan dengan PPK serta para kades di Kecamatan Ampelgading. Padahal, hasil 1.700 suara yang diperoleh Ajeng mayoritas berasal dari jaringan kultural NU seperti Fatayat, Muslimat, serta PAC PKB di Ampelgading yang dari awal berkomitmen memenangkan Ajeng setelah dirinya sepakat diminta maju. Pertentangan tersebut berujung pada tuduhan kosong karena tidak ada bukti. Setelah ditelusuri, permainan semacam itu ternyata memang ada dan kerap dijadikan senjata saling tuduh. Ajeng,

yang pada saat itu masih awam, menjadikan konflik tersebut sebagai pembelajaran. Konflik horizontal yang dilayangkan senior perempuannya adalah buntut kekecewaan karena gagal terpilih setelah mengerahkan modalitas yang besar. Ajeng mengklaim pada kontestasi pertamanya tidak mengeluarkan mahar sama sekali dalam rangka membagikan uang tunai kepada pemilih. Karena itulah, kandidat lain yang bersaing dengan dirinya merasa iri hati dan tidak terima, juga karena posisi Ajeng yang pada saat itu berstatus sebagai *new comer*.

Bergeser ke Pileg 2014, konflik horizontal perihal segmentasi wilayah antara Ajeng dengan rival satu partainya berlangsung dalam perang dingin. Tidak ada konflik secara terbuka seperti sebelumnya. Hanya saja, salah satu wilayah yang sudah “ditandai” sebagai lahan Ajeng pada menit-menit akhir “ditembak” oleh rivalnya dengan nominal politik uang sebesar Rp100.000 per kepala. Praktik tersebut terjadi tepat pada malam sebelum hari pemilihan tiba. Salah satu informan juga menyampaikan ada indikasi permainan suara di beberapa tempat. Di periode 2014 Ajeng gagal terpilih. Selain karena suaranya terpaut 926 lebih rendah dari rival satu partainya tersebut, kuota PKB di Dapil Pemalang III juga hanya berjumlah satu kursi. Waktu itu, Ajeng dan timnya tidak melakukan serangan balik dengan menambal nominal politik uang yang lebih besar. Ia tidak mengelak turut melakukan praktik-praktik politik uang, tetapi orientasinya bukan sebagai pemikat utama konstituen. Praktik politik uang yang ia lakukan lebih ditujukan sebagai upaya untuk mengimbangi lawan dan terhimpit permintaan masyarakat.

“Termasuk kekalahan ibu di yang kedua 2014 itu, lah ternyata memang ada sekelompok orang yang “*dodolan*”. *Aku durung ngeh lah waktu itu wong nang ndeso*. Selisih suaranya lumayan juga dengan yang terpilih. Pikiran saya waktu itu ndak ada dicurangi. *Pak Kiai kan nate ngendika*,

koe oleh berjuang paribasan ndas dadi sikil, sikil dadi ndas, ketika di saat proses. Bahkan kemarin itu nek memang kudu tuku suoro, tapi niatmu ojo diniati nggo tuku. Ketika koe ngei, diniati bahwa ini hanya untuk ngimbangi daripada nanti yang terpilih malah lebih kurang lah secara niatane. Yo coro gampang itu hanya perang strategi untuk ngikutin, tidak ada niatan untuk membeli suara”.⁶

Keterangan serupa turut disampaikan Ajeng. Ada pemaknaan yang bergeser jauh tentang politik uang. Praktik semacam itu tidak lagi dilihat dari satu sisi sebagai pelanggaran pemilu. Masyarakat melihat politik uang dengan makna yang lebih beragam. Di lapangan, Ajeng mendengar masyarakat menyampaikan bahwa pemberian uang dari kandidat bisa bermakna sedekah, simbol kedermawanan, kemapanan ekonomi, bahkan yang lebih ekstrem bisa dilihat sebagai kelaziman yang harus dilakukan oleh kandidat.⁷ Namun, Ajeng masih berkeyakinan bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan pilihan. Ia masih memegang prinsip bahwa kedekatan adalah unsur yang harus dibangun untuk menumbuhkan ikatan emosional, dengan hasil loyalitas jangka panjang.

“Semua caleg mesti “mbagi” kabeh. Nah tergantung nanti di TPS iki milihe sopo. Pertimbangan orang kalau kenal sama kita, oh iya dia sering dateng pas acara jami’ah, oh iya Bu Ajeng sering memfasilitasi saya, oh saya sering ketemu Bu Ajeng dan apa, nah itu masih ada hati nurani dia untuk memilih. Bukan tergantung berapa nominal yang kita kasih. Nek bagi saya itu. Meskipun butuh tenaga dan waktu ekstra buat ngopeni konstituen. Karena itu capek kan ada juga yang berpikiran wis malem hari pake sistem “tebasan” aja dikei seket-seket rampung. Prinsipku ndak semacam itu”.⁸

⁶ Wawancara dengan Sugi Hadiyanto (Kepala Desa Tegalsari Timur) pada tanggal 19 Februari 2025.

⁷ Wawancara dengan Kusweni (Kordus Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

⁸ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

Keterangan yang disampaikan Ajeng relevan dengan hasil wawancara tidak langsung dengan beberapa konstituennya. Salah satunya adalah Soleha, tim sukses perempuan dari Desa Kebagusan. Walaupun nominal uang yang dibagikan Ajeng tidak sebanyak calon lain atau bahkan ada konstituen yang terlewat mendapat “amplop”, Soleha serta beberapa tetangganya masih tetap memilih Ajeng dengan alasan “melas” dan menganggap Ajeng sebagai “wonge dewe” karena sering datang ke acara pengajian desa dan terlibat dalam kegiatan tertentu, seperti santunan kepada anak yatim, memberi sambutan di TPQ atau Madrasah, serta ramah dengan warga.

Kegagalan Ajeng pada Pileg 2014 tidak menyurutkan keberaniannya untuk kembali mengikuti kontestasi politik. Padahal, dua tahun sebelum Ajeng maju kembali di tahun 2014, suaminya sudah terlebih dahulu dilanda kekalahan pada Pilkada Tegalsari Timur 2012. Suaminya kalah melawan rival politik yang merupakan kepala desa sebelumnya. Kekalahan ini turut membuktikan bahwa posisi Ajeng saat duduk sebagai dewan periode 2009 – 2014 tidak serta merta dapat dimanfaatkan untuk kesuksesan karier politik suaminya. Begitupun sebaliknya. Baik Ajeng maupun suaminya, mereka harus membangun dan merawat mesin politik masing-masing dalam lingkup kontestasi politik yang berbeda. Pada rentang waktu 2014 – 2019, Ajeng tetap aktif di struktural PKB dan menjadi Ketua DPAC PKB Ampelgading. Kegagalannya duduk sebagai anggota dewan juga tidak memadamkan semangatnya berkegiatan dalam lingkungan kultural NU, terutama Fatayat yang ia rintis di Tegalsari Timur. Di samping rumahnya juga berdiri TPQ Berbaur. Ia turut serta mengelola TPQ tersebut beserta PAUD dan TK Muslimat.

Ajeng memanfaatkan dengan baik semua jeda waktunya untuk merawat jaringan dan mengakumulasinya menjadi modal politik.

Menjelang 2018, masyarakat Tegalsari Timur berbondong-bondong kembali meminta suami Ajeng untuk maju Pilkadaes. Mereka merasakan desanya tidak banyak perubahan di jeda waktu saat suami Ajeng tidak menjabat. Justru terdapat banyak hal yang dirasa kurang saat dibandingkan dengan kinerja suami Ajeng dan terkait dengan keterampilan sosial dalam bermasyarakat. Ajeng merestui suaminya untuk kembali berkontestasi atas dorongan dari masyarakat. Ia juga mengeklaim saat itu tidak ada politik uang dari suaminya. Kondisi finansialnya kala itu tidak memungkinkan. Jangankan politik uang, kalkulasi modal untuk biaya operasional Pilkadaes saat itu juga belum ada persiapan yang matang. Masyarakat sendirilah yang bergotong-royong menyumbangkan berbagai bentuk dukungan, seperti sembako, hasil tani dan perkebunan, bahkan uang tunai untuk digunakan dalam mobilitas tim. Hasil dukungan tersebut berbuah manis. Suami Ajeng terpilih sebagai Kepala Desa Tegalsari Timur dalam perhelatan Pilkadaes Serentak 2018.

Tak berselang lama setelah suaminya terpilih, struktural partai dan masyarakat turut meminta Ajeng memantapkan diri untuk maju lagi sebagai caleg pada Pemilu 2019. Rasionalisasi partai sudah barang tentu didasari atas militansi dan kinerja kepartaian Ajeng. Hal menariknya adalah masyarakat Tegalsari Timur yang notabene adalah basis merah mulai menerima dan mendukung Ajeng. Mereka merasakan manfaat langsung pada saat Ajeng menjabat sebagai dewan di periode 2009 – 2014. Banyak program yang masuk ke desanya, seperti perbaikan jalan, bantuan pertanian, renovasi musala, santunan yatim piatu, dan lain sebagainya,

meskipun saat itu desanya belum bisa dijadikan basis suara. Cara Ajeng bersosialisasi dengan masyarakat juga dinilai baik, juga dengan menjaga keseimbangan peran sebagai “Bu Lurah” (istri kepala desa). Oleh karena itu, masyarakat merasa membutuhkan Ajeng untuk kembali duduk sebagai representasi mereka di parlemen.

Pileg Kabupaten Pemalang 2019 kembali mempertemukan Ajeng dengan *incumbent* satu partai yang mengalahkannya di periode sebelumnya. Konflik horizontal tidak hanya terjadi pada saat hari pemilihan, tetapi sudah dimulai sejak penentuan nomor urut kandidat. Ajeng harus berpuas diri berada pada nomor urut 3, karena nomor urut 1 diberikan pada rivalnya yang disebut memiliki “surat sakti” dari struktural pusat. Perlawanan balik yang dilakukan oleh Ajeng saat itu adalah cek ombak kepada partai untuk mengundurkan diri, tetapi ditahan oleh mentor-mentor politiknya dan dibujuk oleh masyarakat. Mereka secara bersama-sama meyakinkan Ajeng bahwa di nomor berapapun ia ditempatkan, para konstituen akan tetap mendukung penuh. Hasil akhir perolehan suara menempatkan Ajeng di posisi *runner up* dalam satu partainya dan urutan terakhir di dapilnya, dengan selisih 21 suara dari kandidat partai lain. Secara dramatis Ajeng berhasil terpilih, karena PKB mendapat 2 kursi dari total 8 kursi di Dapil Pemalang III pada Pemilu 2019.

Dinamika serupa kembali terjadi pada Pemilu 2024. Wilayah yang dianggap Ajeng sebagai “*lahan sing wis tak patok*” di lima desa Kecamatan Ampelgading lagi-lagi “dijajah” atau beririsan dengan rekan sesama partainya. Ia harus bersaing dengan *new comer* laki-laki. Bahkan, basis pemilih perempuan Nahdliyin seperti Fatayat dan Muslimat juga berusaha dimasuki oleh rivalnya.

Kandidat tersebut menggunakan jaringan kerabatnya, khususnya kakak perempuannya, yang juga merupakan kader Fatayat NU. Ajeng mengeluhkan situasi ini kepada internal partai. Namun, partai memang tidak mengatur mekanisme formal dan sanksi resmi soal irisan wilayah serta jaringan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan partai adalah musyawarah sekaligus pengarahan untuk menguatkan konsolidasi sesama kader. Meskipun pada akhirnya Ajeng tetap menang mutlak mendapatkan total 8.252 suara, tetapi *new comer* sebagai rival politiknya juga memperoleh suara yang cukup tinggi, bahkan tembus lebih dari 1.000 suara di Ampelgading. Hal ini menunjukkan bahwa segmen wilayah dan jaringan yang sudah ditandai kandidat pun tidak bisa bebas dari risiko persaingan rival satu partai. Aspek yang menentukan pilihan kembali pada konstituen itu sendiri.

Pemilu 2024 juga memotret dinamika lain ketatnya persaingan antar kandidat, terutama dalam aspek modalitas finansial. Fenomena ini dirasakan hampir semua kandidat yang berkontestasi. Ketatnya persaingan berjalan linear dengan kenaikan biaya politik yang harus dikeluarkan. Di Pemilu 2024, Ajeng memperkirakan modal yang ia keluarkan berada di kisaran Rp800.000.000, naik sekitar Rp200.000.000 dari Pemilu 2019. Informasi ini dibenarkan oleh suami Ajeng. Ia menyebut Pemilu 2024 dengan slogan “*paribasan ora mbagi ora bakal dipilih*”. Praktik politik uang pun tidak terelakkan lagi. Keterangan serupa turut disampaikan tim sukses Ajeng.

“*Yo mbagi, cuma mbagine* nggak sebanyak yang di luar. *Nggo ganti anu lah, nggo ngimbangi juga*. Nominale di bawah yang lain”.⁹

Terlebih, ada kandidat dari partai lain di satu desanya yang ikut maju. Kandidat tersebut merupakan saudara dari Kusweni, salah satu tim suksesnya yang sudah kebersamai sejak awal kontestasi. Cara mereka mengatasi situasi ini adalah dengan membagi dukungan dalam satu keluarga.¹⁰ Cara ini dianggap sebagai jalan tengah untuk mempertahankan loyalitas pada Ajeng sebagai kandidat yang sudah didukung sejak awal, sekaligus memenuhi norma kepantasan tetap mendukung saudara yang maju.

Ketatnya persaingan pada Pemilu 2024 turut dirasakan oleh rekan satu partai Ajeng dari dapil yang berbeda. Ia merupakan Kiai yang memiliki pondok pesantren dan Dewan Syuro PKB Pemalang, serta sudah duduk tiga periode sebagai anggota legislatif. Istrinya adalah Ketua PC Fatayat NU Pemalang dan rekan dekat Ajeng. Dalam satu kesempatan, istrinya yang kerap disapa Bu Nyai, menguatkan temuan yang menyebut bahwa Pemilu 2024 menjadi ajang pertarungan yang sangat ketat dan materialistis.¹¹ Di dapil tersebut, suaminya berhadapan dengan *new comer* satu partai dengan *background* anak pengusaha tambang. Rival tersebut pada akhirnya berhasil terpilih, bahkan dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Pemalang. Lebih dari 12.000 suara berhasil diraup pada kontestasi pertama *new comer* tersebut. Informasi di lapangan menyebut bahwa kandidat itu mengeluarkan

⁹ Wawancara dengan Kusweni (Kordus Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Natasha Rara (Anggota KPPS, Pemuda Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

¹¹ Wawancara dengan Siti Muyassaroh (Ketua PC Fatayat NU Pemalang, Istri Dewan Syuro PKB) pada tanggal 26 Desember 2024.

modalitas finansial paling besar dibandingkan kandidat yang lain. Namun, suami Bu Nyai juga tetap terpilih, meskipun tidak mengeluarkan uang sebesar penantang baru. Di dapil tersebut PKB mendapatkan 2 kursi.

Berkaca dari temuan di atas, modal finansial yang dikeluarkan Ajeng tergolong lebih kecil dari rata-rata caleg potensial lain yang menarget untuk menang. Informasi di lapangan menyebut bahwa di level kabupaten, caleg setidaknya harus menyiapkan uang >1 milyar sebagai ongkos politik. Temuan riset bahkan menyebut angka spesifik berada di kisaran 3 milyar rupiah (Aspinall & Berenschot, 2019). Ajeng menyampaikan alasan lain dirinya memilih Ampelgading sebagai lumbung suara. Baginya, biaya politik di Ampelgading masih tergolong murah dibandingkan daerah lain, termasuk Petarukan. Kondisi sosiologis masyarakat Ampelgading yang lebih lekat dengan ciri masyarakat pedesaan menganggap kedekatan sebagai bagian dari identitas mereka. Maka dari itu, uang bukanlah penentu utama dukungan, meskipun perannya tetap penting. Kesediaan Kusweni untuk tetap berada dalam jaringan pemenangan Ajeng dan memilih untuk membagi dukungan keluarganya walaupun ada kerabatnya yang maju membuktikan bahwa kedekatan dengan kandidat sangatlah penting. Ia tidak menerima uang tambahan dari Ajeng, tetapi dukungannya tetap diberikan kepada Ajeng.

Uraian tersebut memperkuat bukti bahwa jaringan yang dirawat dengan baik oleh kandidat dapat menjadi modalitas yang sangat penting, bahkan bisa mengatasi kendala atau kurangnya modal finansial yang digadang-gadang menjadi kunci keterpilihan. Terpilihnya rekan Ajeng yang merupakan kiai juga bisa

menjelaskan hal serupa. Tanpa membagi uang sekalipun, “*dhawuh*” sudah dianggap cukup untuk menggerakkan para santri, jamaah, dan pengikutnya dalam memberikan pilihan. Bukti lain dijumpai di daerah Comal. Kiai senior Ajeng yang maju dalam tiga kali kontestasi selalu mendapat lebih dari 3.500 suara tanpa “*mbagi*”. Hal yang membedakan antara Ajeng dengan para kiai tersebut adalah kekuatan ikatan jaringan. Di sejumlah literatur, relasi antara kiai dengan santri atau pengikutnya telah mencapai derajat patron-klien, sehingga jaringan serta ikatan yang terbangun sudah tentu lebih kuat (Furqon & Nurhandjati, 2023; Susianah, Romli, & Rochadi, 2023). Selain itu, ada atribusi simbolik yang menempatkan kiai berada pada struktur sosial yang tinggi dan ia disegani masyarakat (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam keterpilihan Ajeng, ia memulai dari titik yang berbeda. Kekuatan jaringan harus dibangun dan dirawat dengan lebih ekstra. Ia harus memastikan terlebih dahulu dirinya dapat diterima masyarakat yang selanjutnya membentuk jaringan kemenangan bagi kontestasinya. Perjalanan panjang kontestasi yang dilewati sejak 2009 menunjukkan peran penting jaringan perempuan dan kultural NU bagi keterpilihan Ajeng. Namun demikian, jaringan tersebut mengalami transformasi menjadi lebih heterogen seiring dengan semakin luasnya dukungan yang diperlukan untuk bertahan dalam percaturan politik.

3.2. Transformasi Jaringan Kemenangan Homogen Menjadi Heterogen dan Proses Perluasan Jaringan

Sepanjang periode 2009 – 2024, komposisi jaringan kemenangan Ajeng diisi oleh 80% orang yang sama. Adapun sebanyak 60 – 80% konstituen Ajeng

adalah perempuan.¹² Konsistensi Ajeng mempertahankan orang-orang lama dalam timnya digambarkan dengan filosofi “*nandur, mupuk, muwur, manen*”. Hal serupa ia terapkan untuk mempertahankan lumbung suara dengan basis-basis wilayah dan jaringan yang sama. Kata “*nandur*” artinya menanam, “*mupuk*” artinya memupuk, “*muwur*” artinya menabur, dan “*manen*” artinya memanen. Filosofi ini jika digabungkan bermakna bahwa jaringan dan lumbung suara yang telah ditargetkan atau ditanam selanjutnya harus dipupuk dengan berbagai upaya, termasuk menabur berbagai perbekalan dan konsolidasi, agar nanti pada saat waktunya tiba dapat dipanen hasilnya.

Proses dari *nandur, mupuk, muwur*, sampai dengan *manen*, tentu tidak instan. Maka dari itu, tahapan ini merupakan proses panjang yang Ajeng sama artikan dengan membangun dan merawat jaringan dari waktu ke waktu. Kelemahan metode ini terletak pada lamanya waktu yang diperlukan dan banyaknya upaya serta biaya yang dikeluarkan untuk menghidupi jaringan, yang kadangkala sama mahalnnya dengan metode “*tebasan*” pada malam sebelum pemilihan. Metode *tebasan* adalah kata lain dari *vote buying* dan *money politics*. Pragmatisme aktor-aktor politik yang memandang politik uang sebagai hal wajar serta tingginya permintaan masyarakat menjadikan *tebasan* lebih diminati, terutama bagi *new comer* dengan modal finansial yang besar. Tak heran, banyak kandidat yang berganti-ganti jaringan karena tidak memiliki basis massa yang jelas. Asalkan ada uang, jaringan instan dapat terbentuk. Namun, jaringan semacam itu jarang ada

¹² Wawancara Studi Pendahuluan dengan Ajeng Triyani pada tanggal 28 Juni 2024, diperkuat dengan Wawancara Penelitian pada tanggal 4 Februari 2025.

yang bertahan lama. Ajeng masih berpegang pada prinsipnya. Metode *nandur*, *mupuk*, *muwur*, dan *manen*, memiliki kelebihan untuk menguatkan loyalitas jaringan dalam jangka panjang. Hal ini menjadi logis melihat banyaknya loyalis yang bertahan di jaringan Ajeng dari pemilu ke pemilu.

Komposisi jaringan Ajeng pada Pemilu 2009 cenderung bersifat belum terorganisasi dan semi homogen. Segmen pemilih yang ditarget pada saat itu menyasar lingkaran kultural NU secara khusus, terutama Fatayat dan Muslimat, namun pengorganisasiannya belum bersifat terstruktur. Beberapa badan otonom juga ikut dikonsolidasikan, namun sifatnya masih perorangan, khususnya yang terlibat struktural PKB. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dukungan karena mereka yang meminta Ajeng untuk maju mencalonkan diri. Saat itu Ajeng juga baru mengawali gerak politiknya dengan bersilaturahmi dari satu jaringan ke jaringan yang lain, sehingga konsolidasi belum terbangun secara kuat dan basis massa belum terlihat jelas. Ajeng berusaha menjajaki semua potensi jaringan yang bisa ia masuki, sekaligus sebagai upaya pemetaan. Atribusinya sebagai istri kepala desa dan Ketua PKK juga belum bisa dimaksimalkan untuk memobilisasi dukungan. Alih-alih menggunakan kuasa suaminya, Ajeng lebih memilih proses bertahap menjaga persatuan masyarakat yang terpolarisasi pasca pilkades. Ia paham bahwa untuk mendapat dukungan dari segmen warna yang berbeda, upaya yang dilakukan membutuhkan waktu lebih lama.

Pada Pemilu 2014, jaringan sudah mulai terorganisasi dan menunjukkan tipenya yang homogen. Jaringan yang sudah dibangun dari Pemilu 2009 dirawat dan dikembangkan dengan segmentasi yang lebih jelas. Ajeng mulai menarget

secara matang segmen pemilih perempuan, khususnya yang berasal dari kultural NU. Keberadaan Ajeng diterima dengan baik oleh jaringan-jaringan tersebut. Ia juga telah menandai secara lebih jelas wilayah-wilayah yang bisa dijadikan basis suara. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil akhir Pileg 2014 belum menempatkan Ajeng pada posisi terpilih, karena ada kandidat satu partainya yang memperoleh suara lebih tinggi dengan metode *tebasan*. Jumlah kursi PKB di Dapil Pemalang III pada saat itu juga turun menjadi hanya satu kursi.

Jeda waktu dari Pemilu 2014 ke 2019 dimanfaatkan dengan baik oleh Ajeng untuk tetap merawat jaringan, meskipun ia tidak lagi memiliki jabatan formal di parlemen. Langkah geraknya ia fokuskan ke partai dan tetap di lingkaran kultural NU. Oleh karena itu, pada saat ia kembali maju di Pemilu 2019, jaringannya masih terorganisasi dengan baik dan menunjukkan tipe yang serupa dengan beberapa penambahan. Jumlah suara yang ia peroleh naik dari pemilu sebelumnya, walaupun tidak signifikan seperti kenaikan suara dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014. Periode 2019 dapat disebut sebagai momen emas bagi Ajeng dalam menapaki karier politiknya. Masyarakat desanya perlahan mulai memberikan dukungan karena telah melihat kontribusi nyata pada saat Ajeng menjabat sebagai dewan, lalu merefleksikannya ketika Ajeng tidak terpilih. Lumbung suara Ajeng bertambah. Suaminya yang kembali terpilih pada Pilkades 2018 setelah gagal di 2012 juga membawa tambahan amunisi. Ajeng mulai terampil mengkapitalisasi modalitasnya sebagai istri kepala desa. Ada jaringan PKK dan Paguyuban Istri Kepala Desa yang bisa ia maksimalkan untuk dimintai dukungan. Di tahun 2022, Ajeng mendapat kesempatan *rolling* jabatan menjadi Wakil Ketua I DPRD Pemalang. Posisi ini

tentu membawa pengaruh dan keuntungan tersendiri bagi karier politik Ajeng, termasuk pengembangan jaringan. Pada tahun yang sama, ia mulai merintis kerjasama dengan Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) untuk memberi kontribusi pada segmen konstituen perempuan secara lebih luas.

Bekal dari periode jabatan 2019 membentuk Ajeng semakin terampil berjejaring. Jaringan bertransformasi menjadi heterogen vertikal di Pemilu 2024. Ajeng menyadari bahwa posisi dan atribusi yang melekat pada dirinya dapat membuka peluang yang lebih besar, dengan derajat penerimaan yang lebih terbuka. Ia mulai masuk ke segmen-segmen pemilih yang berbeda, mulai dari lintas agama, hobi, politik, hingga ekonomi.

Tak dipungkiri, ada andil suaminya yang turut berperan membukakan jalan masuk ke jaringan-jaringan tersebut. Terdapat penilaian yang berbeda ketika kandidat masuk dalam posisi politik yang mapan dan tidak. Kemapanan ini menentukan sejauh mana ia bisa diterima dan dipercaya konstituen, utamanya yang melibatkan jaringan lintas kelas. Pendekatan yang dilakukan pun berbeda. Kandidat terkadang melibatkan pihak lain sebagai penghubung. Kecamatan Petarukan yang semula tidak masuk sebagai basis suara Ajeng perlahan bisa diusahakan di 1 – 2 desa. Alhasil, perolehan suara Ajeng secara keseluruhan melonjak signifikan, hampir dua kali lipat dari pemilu sebelumnya. Perolehan tersebut tidak lepas dari peran dan dinamika jaringan.

Tabel 3.2.**Transformasi Jaringan Pemenangan dari Pemilu ke Pemilu**

Periode Pemilu	Sifat Jaringan	Tipe Jaringan
Pileg 2009	Belum Terorganisasi	Semi Homogen
Pileg 2014	Terorganisasi	Homogen
Pileg 2019	Terorganisasi (Konsolidasi Ulang)	Semi Heterogen (Horizontal)
Pileg 2024	Terorganisasi (Mapan)	Heterogen (Vertikal)

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Secara lebih spesifik, jaringan-jaringan perempuan yang menjadi mesin dan basis kemenangan bagi Ajeng adalah sebagai berikut:

a. Fatayat NU

Sejak pertama kali Ajeng pindah ke Pemalang pada tahun 2007, Fatayat menjadi jaringan pertama yang ia rintis di Tegalsari Timur. Ajeng berperan sebagai pemrakarsa lahirnya Fatayat di desa itu. Suami Ajeng mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai baktinya kepada NU, sekaligus wujud menjadikan desanya sebagai desa yang inklusif. Sugi pernah merasakan pengalaman kurang menyenangkan soal sulitnya menggunakan fasilitas desa, seperti balai desa, pada saat dirinya berkegiatan IPNU semasa muda dulu. Pengalaman pribadi tersebut turut menjadi faktor yang mendorong Sugi dan Ajeng berusaha memanfaatkan dengan baik atribusi sosial dan politik yang mereka miliki untuk memperluas jaringan NU di desanya.

“Pas awal yo *koyo* Fatayat, kan memang yang mbangun Bu Ajeng. Dia ketua Fatayat Tegalsari Timur, kalau saya bendaharane, *bojone* Pak

Carik jadi Sekretaris. Sebelum jadi dewan kan sudah aktif di situ. Yo *koyone* justru PKB yang ke situ ra”.¹³

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, informan menuturkan bahwa pembentukan Fatayat di Tegalsari Timur pada awalnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur politis untuk memenangkan Ajeng. Fatayat merupakan salah satu badan otonom NU, dengan segmen anggota perempuan berusia 20 tahun atau sudah menikah sampai dengan 40 tahun. Banom ini sudah berdiri sejak 24 April 1950 dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dari pusat hingga anak ranting. Maksud Ajeng merintis Fatayat di Tegalsari Timur ditujukan untuk mengembangkan dan menggerakkan jaringan perempuan NU, terutama di bidang sosial keagamaan. Saat itu belum terbesit di benak Ajeng untuk ikut serta dalam kontestasi politik sebelum dibujuk oleh senior-seniornya di PKB menjelang Pemilu 2009.

Kendati demikian, resistensi sudah muncul sejak awal-awal pembentukan Fatayat.¹⁴ Ajeng menghadapi dua bentuk resistensi.¹⁵ Pertama, pertentangan muncul secara terselubung terkait dengan minimnya minat perempuan di Tegalsari Timur untuk bergabung. Tidak banyak anggota Fatayat pada saat awal-awal pembentukan, karena tidak mungkin dalam waktu cepat bisa “menghijaukan yang merah”. Ajeng merintis bersama dengan orang-orang yang sudah ia kenal dekat. Kedua, pertentangan secara terbuka datang dari senior yang biasa dipanggil Nyai, istri seorang haji yang cukup disegani di tempatnya. Mereka merupakan kader militan PPP. Nyai tersebut melakukan konfrontasi secara terbuka kepada jamaah

¹³ Wawancara dengan Kusweni (Kordus Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Sugi Hadiyanto (Kades Tegalsari Timur) pada tanggal 19 Februari 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

yang dekat dengannya untuk tidak perlu ikut Fatayat. Baginya, Fatayat sama dengan PKB. Upaya Ajeng untuk menghidupkan majelis dan kegiatan seperti yasinan, barzanji, pengajian, dan semacamnya, dinilai tidak perlu dilembagakan dengan Fatayat maupun organ lainnya. Nyai tersebut khawatir bahwa pembentukan Fatayat hanya dilakukan demi politisasi PKB terhadap jamaah NU.

Sangkaan itu ternyata menemui benang merahnya, meskipun pada awalnya Ajeng sama sekali tidak berniat seperti yang dituduhkan. Setelah menyadari bahwa desanya belum bisa dijadikan lumbung suara dan demi menghindari polarisasi lebih jauh, Ajeng lebih memilih masuk ke jamaah lain di luar desanya. Salah satunya adalah Fatayat Kebagusan. Sejak Ajeng pertama kali mencalonkan diri, Kebagusan sudah dikenal sebagai basis PKB karena memiliki penduduk Nahdliyin dengan jumlah yang cukup banyak. Di samping itu, terdapat beberapa senior Ajeng yang berdomisili di Kebagusan, sehingga memudahkan langkah geraknya untuk masuk ke wilayah ini. Mereka pun menyambut Ajeng dengan baik.

“Saya menjabat baru, baru setengah tahun. Tapi ikut Fatayat itu sudah hampir 15 tahun apa ya, *awit 2006 berarti piro kui, limolasan tahun luwih ya*. Dari pertama kali ada Fatayat di Kebagusan berarti. *Yo mungkin anggere Fatayat kui identik karo PKB*, tapi tidak semua anggota Fatayat itu PKB. Kebagusan sebagian besar PKB, dari dulu. Pondok Kebagusan *yo terkenal iyo PKB. Tapi yo koyone tergantung sing teko sopo koyo kui. Umpomo koyo Bu Ajeng nyalon kui yo memang mreng*, pertama kali dimenangkan Kebagusan. *Mulane ngurip-nguripi tekan saiki, igek koyomono nggondeli lah*”.¹⁶

Informan menyampaikan, banyaknya orang-orang dari jaringan Fatayat yang mendukung Ajeng dilatarbelakangi oleh kesamaan identitas gender dan faktor

¹⁶ Wawancara dengan Maria Ulfa (Ketua PR Fatayat NU Kebagusan) pada tanggal 5 Februari 2025.

kedekatan. Mereka sebagai perempuan merasa terwakili ketika memiliki dewan perempuan. Adapun faktor kedekatan yang dimaksud merujuk pada kandidat merupakan orang yang dikenal secara personal oleh jaringan. Dalam hal ini, aktivitas sosial Ajeng yang berada satu lingkup dengan jaringan kultural NU menjadikan dirinya kerap terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan Fatayat. Dari sinilah kedekatan terbangun. Kedekatan tersebut menciptakan rasa percaya dalam suatu kelompok, sehingga antara kandidat dengan jaringan dapat memiliki ikatan psikologis.

Kini, Fatayat menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Kabupaten Pematang Jaya. Diperkirakan jumlah anggotanya mencapai 20.000 orang.¹⁷ Di Dapil III tempat Ajeng berkontestasi, Kecamatan Ampelgading memiliki Anggota Fatayat sebanyak 1.250 orang, sedangkan Kecamatan Petarukan memiliki Anggota Fatayat sebanyak 655 orang. Tentu hal ini menjadi potensi tersendiri dalam hal memperluas arah gerak dan mencapai tujuan organisasi. Besarnya jumlah anggota dalam organisasi ini juga berpeluang besar untuk mengembangkan jaringan bagi siapa saja yang menjalin ikatan. Singkatnya, jaringan ini menjadi ladang potensial mobilisasi dalam konteks politik praktis.

b. Muslimat NU

Muslimat merupakan salah satu badan otonom NU yang segmen anggota dan tujuannya mirip dengan Fatayat. Secara keanggotaan, hal yang membedakan antara Muslimat dan Fatayat adalah aspek usia. Anggota Muslimat ialah perempuan

¹⁷ Informasi dari Ika Purwanti (Sekretaris PC Fatayat NU Pematang Jaya) dalam percakapan via *WhatsApp* pada tanggal 6 April 2025.

berusia lebih dari 40 tahun atau sudah menikah yang menganut *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Organisasi ini sudah berdiri sejak 29 Maret 1946. Sama seperti Fatayat, Muslimat memiliki struktur kepengurusan berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan anak ranting. Keberadaan badan otonom yang menyentuh level desa/kelurahan atau bahkan dusun dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan pergerakan NU di masyarakat untuk mencapai tujuan sampai pada akar rumput.

Saat ini, jumlah anggota Muslimat NU Pemalang mencapai 30.000 orang. Sebaran anggota Muslimat yang berada di Kecamatan Ampelgading diperkirakan berjumlah 2.000 orang, sedangkan di Kecamatan Petarukan kurang lebih berjumlah 1.200 orang.¹⁸ Jumlah ini sangat potensial dan menandakan bahwa Muslimat memiliki massa yang besar. Oleh karena itu, keterlibatan jaringan Muslimat memiliki peran strategis dalam mendukung kandidat atau aktivitas politik tertentu. Muslimat juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Jaringan yang luas serta pengalaman panjang keterlibatan Muslimat dalam kegiatan sosial mampu menjadi kekuatan untuk memperjuangkan isu yang telah dipetakan. Salah satu jalan untuk mencapai optimalnya pergerakan tersebut adalah memiliki wakil atau perpanjangan tangan di pemerintahan

Keterlibatan jaringan Muslimat NU mendukung kemenangan Ajeng sebagai calon legislatif didasari oleh alasan serupa. Mula-mula, Ajeng sowan dan meminta wejangan dari mentor politiknya di Kebagusan saat hendak maju

¹⁸ Informasi dari Kadarsih (Ketua PAC Muslimat NU Petarukan) dalam percakapan via *WhatsApp* pada tanggal 6 April 2025.

kontestasi pertama kalinya. Istri mentornya tersebut merupakan bagian dari struktural Muslimat. Setelah mereka bersilaturahmi, ada kecocokan.

“Karena Bu Ajeng perempuan, ketika masuk ke jaringan kami tentu ada nilai tambahnya, satu visi lah istilahnya. Perempuan itu kan setia, komitmen. Bagiku calon perempuan itu ada keistimewaan sendiri karena rata-rata ya banyaknya perempuan, konstituennya perempuan, jadi kan ada nilai tambah. Saya melihat mba, antara calon laki-laki dan perempuan itu memang beda. Mungkin keterikatan dengan konstituen itu lebih kuat perempuan. Nah Bu Ajeng barangkali memanfaatkan itu”.¹⁹

Informan menuturkan bahwa hubungan jaringan Muslimat di Kecamatan Ampelgading dengan Ajeng, utamanya Kebagusan, sudah terjalin kuat. Jalinan ikatan ini semakin kuat ketika Ajeng secara resmi juga menjadi bagian dari Anggota Muslimat sejak 2020, karena usianya telah mencapai 40 tahun. Beralih dari Fatayat, Ajeng menjadi Ketua Ranting Muslimat Tegalsari Timur. Ia memegang peran yang hampir serupa seperti ketika dirinya merintis Fatayat. Perbedaannya terletak pada intensitas resistensi yang muncul. Posisi Ajeng yang sudah relatif stabil secara kekuatan politik pasca kontestasi keduanya menjadikan potensi gejolak lebih mudah diredam. Ikatan yang dibangun dengan kedekatan itu juga menjadikan jaringan yang sudah berada dalam lingkarannya tidak mudah beralih ke kandidat lain.

Muslimat sudah eksis di Kecamatan Ampelgading sejak tahun 1990-an. Desa Kebagusan menjadi salah satu pionir dan percontohan keaktifan Muslimat. Kebagusan memiliki komposisi masyarakat yang didominasi oleh dua kelompok keagamaan besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Dominasi ini berpengaruh

¹⁹ Wawancara dengan Roihatul Jannah (Wakil Ketua PAC Muslimat NU Ampelgading) pada tanggal 6 Februari 2025.

langsung pada besarnya jumlah massa dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam dari dua kelompok keagamaan tersebut. Sebagai contoh, berbagai bentuk pengajian, barzanji, khaul, menjadi wujud kegiatan yang rutin dilakukan masyarakat NU. Muslimat mengambil peran penting dalam kegiatan-kegiatan ini. Coraknya sebagai organisasi perempuan Islam mendorong Muslimat aktif di berbagai kegiatan sosial keagamaan. Momen inilah yang sering dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memperoleh dukungan dengan cara melibatkan diri atau seminimalnya mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, kandidat yang memiliki latar belakang kultural NU dapat lebih mudah diterima karena ada kesamaan visi yang merekatkan jalinan ikatan dalam jaringan. Ajeng memenuhi kriteria tersebut, bahkan memiliki nilai tambah sebagai sesama perempuan, sehingga Muslimat dapat menjadi bagian dari jaringan pemenangnya yang cukup signifikan.

c. PKK

Menilik ke sejarah, ide gerakan PKK sudah ada sejak tahun 1957 dari Seminar *Home Economic* yang membuahkan rumusan tentang 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan ini mulai dimasyarakatkan pada tahun 1967. Nomenklatur awalnya adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di bawah naungan Orde Baru, struktur PKK terbentuk secara berjenjang yang mewadahi para perempuan atau istri-istri, dengan ketua pusatnya adalah istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nomenklaturnya berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. PKK turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam wajah organisasi perempuan untuk mendukung program-program pembangunan sampai dengan level

desa/kelurahan. Pasca-reformasi, PKK tetap dipertahankan sebagai sebuah wadah dan gerakan dengan nomenklatur yang berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Hierarki struktur kepengurusan PKK menempatkan para istri kepala daerah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) wilayah setempat, termasuk istri kepala desa. Tak terkecuali Ajeng, ketika suaminya terpilih sebagai kepala desa, secara otomatis ia menjabat sebagai Ketua TP-PKK Tegalsari Timur. Ia bergerak dan kebersamai ibu-ibu yang tergabung dalam PKK di desanya. Meskipun TP-PKK sebenarnya tidak membatasi keanggotaan hanya untuk perempuan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota PKK cenderung diisi oleh perempuan, terutama para istri atau ibu. Di Tegalsari Timur, berbagai kegiatan PKK aktif dijalankan, seperti Posyandu, penyuluhan-penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya yang sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.

“Di sini PKK juga lumayan aktif, tapi saya nggak ikut PKK si. Otomatis Bu Ajeng yo juga aktif kan ketua PKK, *bojone* Pak Lurah. Banyak sekali itu memang keaktifannya. Yo saya lihatnya kaya *pontang-panting* gitu lah, cuma memang *wonge trengginas*”.²⁰

Pada periode pertama jabatan suaminya, atribusi sebagai Ketua TP-PKK ternyata tidak berpengaruh signifikan untuk mendukung kontestasi. Saat itu fokus Ajeng hanya menjalankan peran sekaligus menjaga dengan baik amanah yang dipegang. Posisinya sebagai orang baru memengaruhi bagaimana ia harus bersikap. Ada proses adaptasi yang harus dilewati terlebih dahulu, sembari melakukan

²⁰ Wawancara dengan Kusweni (Kordus Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

pengamatan dan menempatkan diri secara benar. Ia juga terikat batasan pertimbangan etika jabatan suaminya. Ajeng menyadari dirinya menjadi contoh bagi masyarakat.

“PKK di desa tetep saya libatkan, tapi ya agak susah mba. Karena saya harus menjaga nama suami saya *piye carane wong saya sebagai Bu Lurah* juga kan harus menampilkan yang baik ke masyarakat”.²¹

Setelah suaminya kembali terpilih di 2018, ternyata jaringan PKK juga belum memainkan peran yang signifikan dalam kontetasi Ajeng. Lingkup PKK yang ia naungi hanya mencakup satu desa. Ajeng tidak menargetkan PKK sebagai jaringan yang dijadikan basis, karena dia menganggap situasi ini riskan disangkutpautkan dengan jabatan yang sedang diduduki oleh suaminya. PKK tetap Ajeng libatkan untuk mendukungnya, namun dalam kapasitas sebagai jaringan tempat sosialisasi berbagai program serta kontribusi nyata yang ia berikan kepada desanya selama menjabat sebagai anggota legislatif. Harapannya, pemahaman tentang hal ini dapat menumbuhkan kesadaran organik bagi masyarakat secara luas tentang politik programatik. Lebih luas, strategi ini Ajeng targetkan untuk menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki kapasitas juga dapat melakukan kinerja yang baik dalam politik.

d. Kelompok Arisan Sembako

Kondisi demografis Pemalang tidak menunjukkan proporsi yang timpang antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Namun, secara sekilas dapat dilihat di pedesaan Pemalang banyak aktivitas sosial-ekonomi yang justru dilakukan oleh perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya lapangan kerja

²¹ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

dalam wilayah, sehingga banyak penduduk laki-laki merantau ke kota-kota besar untuk memperbaiki taraf hidup. Situasi ini secara lebih luas juga berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan di Pemalang. Banyaknya laki-laki dan pemuda yang merantau menyisakan penduduk perempuan dari berbagai kelompok umur tetap tinggal di Pemalang. Oleh karena itu, muncul berbagai kelompok perempuan dengan beragam aktivitas, sebagai salah satu sarana menyatukan koneksi sosial. Kebutuhan terhadap keterhubungan ini menjadi ciri yang melekat dengan masyarakat desa, karena sebagian besar dari mereka masih familiar dengan budaya gotong royong. Koneksi ini bukan hanya menghubungkan mereka secara sosial, melainkan juga bisa berkembang memberi manfaat secara psikologis hingga ekonomi.

Salah satu wujud kelompok sosial ekonomi perempuan di Desa Tegalsari Timur adalah Arisan Sembako. Kelompok ini semacam tempat menabung bagi para anggotanya. Satu kali dalam seminggu terdapat kegiatan rutin sekaligus penarikan iuran anggota. Ajeng memegang amanah menjadi ketua. Ia dipercaya karena memiliki latar belakang pendidikan dan profesional di bidang akuntansi. Tak hanya itu, kepercayaan ini sebenarnya juga muncul karena melihat rekam jejak Ajeng sebagai sosok yang bermasyarakat. Berdasarkan keterangan informan, arisan ini dapat diambil uangnya satu tahun sekali, dengan estimasi perolehan Rp40.000.000.²² Ajeng dibantu oleh beberapa orang terdekatnya dalam mengelola arisan ini, karena kesibukannya di berbagai kegiatan lain.

²² Wawancara dengan Kusweni (Kordus Tegalsari Timur) pada tanggal 21 Februari 2025.

Ajeng selalu menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan rutin arisan. Walaupun berhalangan, ia selalu mendelegasikan tugasnya dan menyampaikan sebab tidak bisa hadir. Acara ini menjadi sarana efektif membangun komunikasi dan memperkuat jalinan ikatan di dalamnya. Kedekatan yang berhasil dibangun membuat kelompok arisan menjadi salah satu jaringan potensial bagi Ajeng, meskipun lingkupnya hanya satu desa. Dalam hal ini, Kelompok Arisan Sembako juga menjadi salah satu perpanjangan aktualisasi program PKK di bidang ekonomi secara tidak langsung. Ajeng menginisiasi sistem yang tidak rigid dan sesuai dengan kultur di desa. Bentuk Kelompok Arisan Sembako yang tidak formal membuat Ajeng lebih fleksibel dalam pengelolaannya, tanpa harus menjaga dengan sedemikian ketat pertautan jabatan dirinya ataupun suaminya.

e. Paguyuban Istri Kepala Desa

Jaringan ini berisi istri para kepala desa di lingkup Kabupaten Pematang Jaya. Dapat dikatakan bahwa jaringan ini lebih mirip sebagai sarana komunikasi dan diskusi untuk menunjang optimalisasi peran para istri kades. Posisi mereka yang turut dilekatkan dengan berbagai atribusi, seperti Ketua TP-PKK, memerlukan sinergi yang baik agar dapat menjalankan perannya secara maksimal. Mereka juga memiliki peran menjadi *support system* bagi program-program desa. Misalnya, dalam hal tindak lanjut instruksi daerah yang semua desa harus melaksanakan, Paguyuban Istri Kades dapat menjadi sarana berkoordinasi. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan Paguyuban Istri Kades mirip dengan haluan PKK.

Jaringan ini tidak dibentuk secara terstruktur oleh personal, tetapi sudah menjadi konsekuensi logis dari atribusi yang melekat ketika suami mereka terpilih

menjadi kepala desa. Artinya, berfungsi atau tidaknya jaringan ini untuk agenda politik bergantung pada sejauh mana kandidat berpartisipasi aktif dalam jaringan. Kandidat juga harus membuktikan diri bahwa dirinya layak didukung. Namun, tak jarang praktik mobilisasi bisa terjadi ketika ada aktor yang posisinya lebih tinggi dan kuat berkepentingan memanfaatkan jaringan. Hal ini terjadi karena aktor memahami bahwa jaringan istri kepala desa banyak mengambil porsi sebagai *opinion leader* di masyarakat, terutama bagi segmen pemilih perempuan di desa. Kapasitas mereka dalam mengorganisasi kegiatan sosial juga bisa menjadi ajang *soft campaign* bagi kandidat. Kegiatan sosial tersebut berperan sebagai panggung sekaligus akses ke masyarakat.

Ajeng membenarkan ada keuntungan yang ia dapatkan melalui hadirnya jaringan ini. Sebagai penduduk pendatang yang bukan warga asli Pemalang, jaringan ini membuka jalan bagi Ajeng untuk mengenalkan diri dan menjadi wadah untuk mengeksplorasi Pemalang secara lebih jauh dari beragam perspektif. Mereka juga bisa menjadi agen sosialisasi bagi kemenangan Ajeng.

“Saat itu saya memang diuntungkan karena saya adalah istri kepala desa, jadi saya akhirnya punya komunitas kan, temen-temen Bu Lurah tak mintai tolong. Ada hal itu juga yang berpengaruh terhadap keterpilihan”.²³

Perkembangan dinamika Pemilu 2024 mengantarkan empat istri kepala desa dan satu mantan kepala desa perempuan di Kabupaten Pemalang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut Ajeng, hal ini menjadi capaian terbanyak sejak ia duduk di parlemen. Keterpilihan ini sekaligus menjadi bukti

²³ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

bahwa pengaruh kepala desa masih tinggi, sehingga modalnya dapat dikapitalisasikan untuk pemilihan legislatif. Namun, ada perbedaan tingkat kematangan dalam mengkapitalisasikan modal. Kebanyakan dari mereka yang hanya memanfaatkan pengaruh instan dari jabatan suaminya belum tentu bisa terpilih lagi ketika maju. Lain halnya jika mereka bisa turut membangun sendiri modal politiknya, maka atribusi sebagai istri kepala desa dapat menjadi nilai tambah yang mendukung kemenangan. Naiknya jumlah para istri kepala desa yang terpilih menjadi anggota legislatif juga dapat dilihat dari sudut pandang semakin ketatnya persaingan, sehingga jaringan ini tidak bisa terlalu diandalkan oleh satu kandidat.

f. Yayasan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)

PEKKA lahir dari inisiatif Komnas Perempuan pada tahun 2000 melalui "Proyek Janda", yang bertujuan mendokumentasikan kehidupan janda di daerah konflik dan membantu mereka mengakses sumber daya melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Bank Dunia (*World Bank*). Nani Zulminarni mengusulkan transformasi proyek ini menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. PEKKA menyorot peran mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Yayasan PEKKA didirikan pada 2004 untuk mendukung pengorganisasian kelompok-kelompok ini. Urgensi keberadaan PEKKA dapat dilihat dari data BPS. Sekitar 25% rumah tangga di Indonesia dipimpin oleh perempuan, dengan mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Survei anggota PEKKA tahun yang sama menunjukkan bahwa banyak dari mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, memiliki tingkat pendidikan dasar atau

tidak tamat, dan sebagian adalah penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jaringan untuk mengadvokasi kelompok perempuan ini menjadi penting.

Peran dan tanggung jawab yang melekat pada diri Ajeng sebagai anggota legislatif perempuan turut membawanya berjejaring dengan PEKKA. Program-programnya mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Pada September 2022, sebanyak 19 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan anggota PEKKA mengikuti kegiatan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan aspek legalitas serta kualitas pengelolaan usaha mereka. Jenis usaha yang dikembangkan oleh para anggota mencakup produksi rempeyek, jajanan tradisional, hingga pembuatan kue ulang tahun. Selanjutnya, pada November 2022, PEKKA Kabupaten Pemalang menyelenggarakan forum diskusi masyarakat bertajuk “Diskusi Kampung”, yang bertempat di Balai Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah desa dan warga dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas isu-isu sosial di wilayah setempat. Selain itu, PEKKA Pemalang juga melaksanakan program pendidikan kepemimpinan melalui Akademi Paradigta, yang dirancang untuk membekali perempuan kepala keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

Kemudahan akses masuk ke jaringan PEKKA didukung oleh posisi Ajeng sebagai Wakil Ketua I DPRD Pemalang. Posisi ini sangat memungkinkan Ajeng bergerak dengan leluasa ke berbagai jejaring dalam beragam tingkatan. Terlebih sebagai dewan perempuan, ada pertautan psikologis tersendiri ketika membangun

kedekatan dengan sesama perempuan. PEKKA memang belum terlibat langsung dalam kemenangan Ajeng. Meskipun demikian, PEKKA memegang peran yang signifikan untuk membantu Ajeng masuk ke segmen pemilih perempuan secara lebih luas. Hal ini juga menunjukkan komitmen dan kepedulian Ajeng kepada konstituennya. Melalui PEKKA, Ajeng bukan lagi berdiri dengan simbolisme golongan, melainkan telah membawa nilai-nilai pemberdayaan secara universal.

Jaringan perempuan yang menyertai kontestasi Ajeng dalam suatu pustaka dapat disebut sebagai modal homososial. Temuan di lapangan menunjukkan hasil yang relevan dengan riset terdahulu yang menyebut bahwa kandidat perempuan cenderung diuntungkan ketika berjejaring dengan sesama perempuan (Aspinall, White, & Savirani, 2021). Ini merupakan metode yang dipakai politisi perempuan untuk mengatasi hambatan kontestasi yang muncul, terutama jika posisi mereka bukan berasal dari lingkaran dinasti. Namun, aspek kelembagaan dan kultur masyarakat dapat memengaruhi peran serta hasil yang berbeda.

Dalam keterpilihan Ajeng, efek afinitas gender muncul karena telah ada instrumen kelembagaan yang mengatur secara spesifik tentang keterwakilan perempuan (UU Pemilu), setidaknya dalam proses pencalonan. PKB Pemalang sebagai partai tempat Ajeng bernaung juga memiliki komitmen kelembagaan untuk mematuhi peraturan tersebut. Meskipun pada awalnya Ajeng diajukan hanya untuk memenuhi kuota afirmasi, tetapi komitmen kelembagaan tersebut pada akhirnya mampu membangun keberanian bagi kandidat perempuan untuk berkontestasi. Di sisi lain, nilai IDG yang relatif tinggi di Pemalang menandakan bahwa masyarakat sudah semakin terbuka dengan munculnya kandidat perempuan. Potret sosiologis

banyaknya perempuan yang aktif di berbagai kegiatan sosial – ekonomi juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih luas di ruang publik. Dalam konteks ini, nilai patriarki yang tersemai hampir di seluruh wilayah pedesaan dapat direduksi melalui pemahaman tentang kebutuhan dan kinerja kandidat.

Efek afinitas gender pada keterpilihan Ajeng juga muncul karena Ajeng berhasil menyatukan koneksi emosional pada saat membangun jaringan. Ia merupakan bagian langsung dari mayoritas jaringan yang mendukungnya. Ini berarti bahwa Ajeng bernaung di bawah visi dan nilai-nilai yang sama. Posisi tersebut memungkinkan Ajeng membangun kedekatan secara lebih leluasa, sehingga koneksi emosional dapat diwujudkan. Koneksi ini berpengaruh pada derajat penerimaan jaringan terhadap Ajeng. Pada tataran yang lebih jauh, isu-isu yang dibawa Ajeng menemui relevansi dengan jaringan yang berada di sekelilingnya. Ia tidak perlu melakukan pemetaan menggunakan orang lain, karena ia terlibat langsung dalam aktivitas jaringan. Dengan demikian, peran sebagai perpanjangan tangan suara konstituen dapat Ajeng jalankan secara lebih mudah. Logika ini sejalan dengan hasil riset terdahulu yang menyebutkan bahwa kombinasi akses ke jaringan perempuan dapat memaksimalkan efektivitas atau keuntungan dari strategi kepemilikan isu gender bagi kandidat perempuan (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Potensi ini bisa semakin optimal ketika akses yang terbuka ke jaringan memiliki tipologi isu yang linear dengan latar belakang kandidat.

Resiliensi Ajeng dari pemilu ke pemilu tidak terlepas dari dinamika dan pergeseran jaringan. Iklim kontestasi yang semakin ketat mengharuskan Ajeng

memperluas jejaringnya untuk tetap bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan posisi politiknya. Dengan jaringan yang semakin luas, ada banyak konstituen dan wilayah yang bisa dijangkau sekaligus menjadi kekuatan baru. Jaringan yang sudah ada bukan tidak digunakan lagi, melainkan ditambah komposisinya. Karena itulah jaringan pemenangan Ajeng bertransformasi menjadi semakin heterogen. Masuknya berbagai jaringan baru menandakan proses ekspansi yang dilakukan Ajeng membuahkan hasil.

Dalam proses perluasan jaringan tersebut, tidak dipungkiri ada andil suami Ajeng. Ia berperan sebagai pembuka jalan ke beberapa jaringan, terutama yang sudah terkoneksi dengannya. Dua kali terpilih sebagai kepala desa merupakan momentum sekaligus atribusi yang cukup krusial, mengingat peran kepala desa masih cukup kuat di wilayah kabupaten. Suatu pustaka bahkan menyebut kepala desa sebagai *broker* yang efektif untuk memobilisasi suara (Aspinall & As'ad, 2015). Maka dari itu, sebenarnya sangat samar untuk menilai kenetralan kepala desa. Mereka memenuhi kriteria yang paling dicari untuk dilibatkan menjadi tim pemenangan. Kepala desa memiliki lingkaran koneksi yang cukup luas, memahami komunitas lokal, dan ada ketaatan dari masyarakat yang timbul dari faktor pengaruh simbolik. Hal yang membedakan keterlibatan mereka dalam kontestasi adalah dominan atau tidaknya pergerakan yang dilakukan.

Jaringan heterogen yang turut terlibat dalam pemenangan Ajeng berasal dari lingkup yang beragam, meliputi:

a. Jaringan Petani dan Pengusaha

Tegalsari Timur merupakan desa di Pemalang yang memiliki keunggulan di sektor pertanian. Berbagai program pemerintah masuk ke wilayah ini. Di antaranya yang terbaru adalah desa ini terpilih sebagai wilayah percontohan ketahanan pangan. Faktor wilayah yang subur dan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani berpengaruh besar terhadap hal ini. Menyadur keterangan warga setempat, Tegalsari sering didatangi oleh pejabat, bahkan mereka kerap bermalam di sana. Bahkan, Tutut Soeharto juga pernah ke desa ini.

Posisi suami Ajeng sebagai Kepala Desa Tegalsari Timur tentu bersinggungan langsung dengan pengelolaan potensi tersebut. Ia banyak berjejaring dengan petani, mulai dari buruh tani, *jragan*²⁴, hingga para pengusaha di sektor pertanian. Buruh tani adalah kelompok yang paling besar jumlahnya di lingkaran jaringan ini. Namun, lingkup dukungan dan pengaruhnya terbatas pada satu desa tersebut. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, afiliasi mereka secara turun-temurun identik sebagai “orang merah”. Istilah “*ben gepeng tetep banteng*” menjadi ungkapan yang menggambarkan tingginya loyalitas mereka terhadap PDIP. Akan tetapi, suami Ajeng mampu mendapat dukungan dari para buruh tani karena perbedaan pemaknaan konteks antara Pilkades dan Pileg dalam hal keterlibatan instrumen partai secara langsung.

“Basisku di sini itu tidak bisa dimobilisasi jadi basisnya Ibu (Ajeng). Ada yang bilang *Pak ngapurone yo, aku wonge njenengan tapi aku wong PDI Pak*. Ya karena dalam artian dia itu menganggap politik beda dengan lurah. Gini katanya, *nek lurah, aku njenengan. Nek partai, piye-piye aku wong banteng Pak*. Masyarakat awam kan gitu. Dalam *artian*

²⁴ Istilah yang lebih familiar di pedesaan Pemalang untuk menyebut tengkulak.

mboh Pak sopo calone wong awet mbiyen bapakku PNI, aku yo PDI. Realitas lapangan kayak gitu".²⁵

Perlu proses yang lebih panjang untuk meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungan kepada Ajeng. Sugi tidak memanfaatkan posisi dan pengaruhnya secara otoriter. Ia memakai cara lain yang lebih halus untuk membukakan jalan agar Ajeng dapat diterima. Keterlibatan Sugi dalam proses ini didasari atas pertimbangan jika Ajeng yang mencoba masuk sendiri ke jaringan petani, peluang diterimanya lebih kecil, karena ia bukan bagian langsung dari jaringan itu.

"Akhire kita bisa sedikit masuk ke mereka kan dengan sedikit-sedikit memberi pemahaman. Aku ndak menyuruh dalam politik sampean harus sepemahaman dengan saya itu ndak. Tetapi harus ingat, kalau dalam politik kita tidak memanfaatkan yo kita yang akan dimanfaatkan. Kan ngunu. Maksud gini loh, politik itu adalah cara. Piye ben kita mendapatkan program, perhatian pemerintah, dan sebagainya, ini alat. Nah sampean, amit nuwun sewu, nang PDI awit mbien, apa yang sudah diberikan? Lah kui, yo kita juga harus pelan. Jadi nanti sewaktu membangun ada kebersamaan".²⁶

Relasi antara Sugi dengan para petani juga menghubungkannya dengan para pengusaha, khususnya di sektor pertanian. Hubungan yang lebih dekat mula-mula terbangun dengan tengkulak, karena mereka sering melakukan aktivitas langsung di desa. Tengkulak, atau yang lebih dikenal dengan *jragan*, selalu memainkan peran dalam siklus pertanian. Ia menjadi *middleman* antara petani dengan pasar yang lebih luas. *Jragan* umumnya juga memiliki koneksi dengan para

²⁵ Wawancara dengan Sugi Hadiyanto (Kepala Desa Tegalsari Timur) pada tanggal 19 Februari 2025.

²⁶ *Ibid.*

pengusaha. Siklus ini pada akhirnya mempertemukan Sugi dengan beragam jenis jejaring di sektor pertanian.

Salah satu jejaring yang memiliki pengaruh bagi kontestasi Ajeng adalah koneksi pengusaha pertanian. Temuan lapangan menunjukkan informan pengusaha beberapa kali menemui Ajeng dan suaminya. Pada suatu kesempatan, mereka membahas tentang potensi pertanian di Tegalsari Timur dan program-program pemerintah yang bisa dijadikan mitra.²⁷ Relasi antara Ajeng dengan pengusaha bersifat mutualisme. Masuknya jaringan ini membuka kontribusi baru dalam hal perluasan modal bagi Ajeng. Ada manfaat riil yang diperoleh dari jaringan pengusaha. Di samping itu, para pengusaha berpotensi mendapatkan keuntungan dari sisi akses dan kesempatan untuk bisa masuk di proyek-proyek tertentu. Namun, dalam hal ini Ajeng menekankan profesionalitas dan kredibilitas, karena relasi mutualisme ini riskan mengalami distorsi. Risiko ini juga dapat menjadi semakin besar karena ada keterkaitan dengan posisi suami Ajeng sebagai kepala desa yang ikut serta dalam lingkaran jaringan.

“Kalau dana memang awal *pure* pake kita sendiri. Kecuali mungkin saat ini sudah *incumbent*, kita ada relasi, *ora ketang mbantu* dan sebagainya itu yo ada. Dan itu juga kan bentuknya utang, bukan mbantu *pure*, harus mengembalikan. Loh kalau misal itu disponsori, akhire kan kita ada ikatan sama dia, saya nganggepnya utang aja”.²⁸

Jaringan pengusaha yang ikut serta membantu Ajeng juga berasal dari relasi personalnya. Ia mengakui ada kemudahan dan pengaruh besar dari posisi struktural yang dimiliki. Seperti pada penghujung Periode 2019, Ajeng memperluas

²⁷ Keterangan dari Andi (Pengusaha) pada tanggal 4 Februari 2025.

²⁸ Wawancara dengan Ajeng Triyani pada tanggal 4 Februari 2025.

jaringan melalui rekannya yang memiliki perusahaan *outsourcing*. Setidaknya terdapat empat pabrik di Pemalang yang dikelola oleh rekannya. Ajeng mendapat manfaat berupa ketersediaan data industri di Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Petarukan. Dengan data ini, Ajeng terbantu dalam hal memetakan target perluasan jaringan ke sektor ekonomi. Data ini juga bisa difungsikan sebagai pegangan dalam menentukan penempatan-penempatan program untuk dijalankan. Koneksi pengusaha memiliki daya hubung yang lebih baik untuk menjembatani Ajeng dengan aktor-aktor ekonomi di tingkat atas, yang seringkali terlibat di arena politik.

b. Jaringan Lintas Agama

Potret demografis Pemalang didominasi oleh penduduk beragama Islam, dengan komposisi mencapai 99%. Maka tak heran jika organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah, memiliki anggota yang sangat banyak, bahkan menjadi organisasi kemasyarakatan terbesar di Pemalang. Namun, jumlah yang signifikan ini tidak menjadi alat kontrol atau dominasi dalam kehidupan beragama. Data menunjukkan indeks moderasi beragama di Kabupaten Pemalang berada pada angka 74% (CMI, 2024). Hal ini menandakan bahwa iklim toleransi dan kerukunan antar umat agama di Pemalang tergolong tinggi.

Momentum Ajeng memperluas jejaring lintas agama juga bertepatan dengan penghujung masa jabatannya di periode 2019. Jabatan yang ia miliki sebagai Wakil Ketua I DPRD Pemalang sangat berpengaruh bagi kredibilitas karier politiknya. Di samping itu, periode ini dianggap sebagai periode yang matang, karena Ajeng telah menjajaki berbagai dinamika sosial politik yang terbentuk dari

keterpilihan dan kegagalan periode sebelumnya. Saat itu, ada beberapa pendeta yang bertamu ke rumah Ajeng. Ia tentu menyambut baik kedatangan para pendeta tersebut. Mereka berdiskusi tentang moderasi dan kerukunan beragama. Para pendeta menganggap Ajeng sebagai sosok berpengaruh dan memiliki jejaring yang luas untuk menjadi agen sosialisasi tentang moderasi beragama. Pertemuan tersebut pada akhirnya sekaligus menjadi penanda terjalinnya relasi dan bertambahnya jejaring Ajeng. Terdapat kebutuhan di antara keduanya untuk saling memaksimalkan pengaruh yang di miliki dalam lingkup masing-masing.

Peran jaringan lintas agama tidak eksplisit dalam proses pemenangan Ajeng. Muara pembahasan dari jalinan komunikasi yang terbangun lebih mengarah pada keberjalanan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Pematang. Dalam politik, FKUB menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas. Keberpihakan pada calon atau partai tertentu dikhawatirkan justru memperparah polarisasi masyarakat. FKUB menyadari bahwa agama menjadi isu yang sangat riskan dipolitisasi. Namun, tidak dipungkiri tetap ada komunikasi personal antara tokoh-tokoh agama tertentu dengan kandidat dengan tujuan yang beragam. Misalnya dalam konteks Ajeng, relasi terbangun karena ada pertautan kepentingan untuk saling mengoptimalkan pengaruh yang dimiliki. Ajeng berperan sebagai *stakeholder* untuk menghubungkan berbagai keperluan program keagamaan sekaligus sebagai agen sosialisasi kerukunan beragama, sedangkan jaringan lintas agama dapat turut mengenalkan Ajeng secara lebih luas kepada lingkaran koneksinya.

c. Jaringan Pedagang Pasar

Aktivitas pasar memegang peran penting sebagai penghubung proses produksi dan konsumsi. Di Pasar Petarukan, terdapat berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari jual beli hingga jasa transportasi. Data mencatat ada 89 kios di Pasar petarukan setelah revitalisasi. Di samping itu, pasar ini juga memiliki terminal angkutan umum. Moda transportasi angkutan umum masih cukup diminati di sekitar Pemalang, karena banyak aktivitas dan sektor-sektor penting sosial ekonomi yang letaknya di sepanjang jalan raya Pemalang – Pekalongan. Pada sektor jual beli, Pasar Petarukan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil dan daging sapi di wilayah Pemalang.

Banyaknya aktivitas dan peran yang dijalankan pada akhirnya membentuk jaringan tersendiri di pasar. Para pedagang memiliki paguyuban sebagai tempat perkumpulan bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan tertentu. Tak hanya itu, paguyuban pedagang pasar juga berfungsi sebagai tempat bertukar informasi, melakukan transaksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga melalui mekanisme informal antar pelaku pasar. Paguyuban ini tidak hanya melibatkan para pedagang, tetapi juga mencakup relasi dengan *supplier*, peternak, para juragan daging, distributor, hingga konsumen.

Lingkup jaringan pedagang pasar yang menaungi aktor-aktor ekonomi cukup luas berpotensi memperluas akses bagi kandidat politik yang berhasil masuk ke jaringan ini. Mereka sering terlibat dalam aktivitas politik lokal, baik yang berbentuk dukungan kepada calon maupun interaksi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Ajeng membangun koneksi dengan jaringan pedagang pasar,

khususnya di Petarukan. Sebagaimana telah disebutkan, Petarukan pada awalnya tidak menjadi basis wilayah pemenangan Ajeng karena bukan domisilinya dan minim jaringan. Upaya pendekatan ke jaringan pedagang pasar dimaknai sebagai proses pemerataan dukungan di dapil tempat Ajeng berkompetisi. Jaringan pedagang pasar juga turut menandai transformasi jaringan pemenangan yang semakin heterogen. Sebab, Ajeng sudah mengkalkulasikan bahwa dirinya perlu menaikkan perolehan suara agar tetap bertahan di kontestasi politik yang semakin sengit.

d. Komunitas Hobi: *Kolongan Doro*

Kolongan doro atau merpati kolong merupakan jenis hobi yang sering dilombakan. Fenomena ini menarik minat masyarakat secara luas, termasuk di Pemalang. Perlombaan merpati kolong dilakukan dengan teknis mengukur kecepatan dan ketepatan burung mendarat di area *kalangan* (lapak dengan tiang tinggi). Kebanyakan peminat hobi ini adalah laki-laki. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari pemuda, petani, pedagang, hingga aparat. Dalam setiap perlombaan merpati kolong, animo masyarakat tumpah ruah di sekitar arena *kalangan*, mulai dari panitia, peserta, penjual jajan dan minum, juga masyarakat luas di sekitar lokasi. Perlombaan merpati kolong biasanya digelar untuk memperingati hari-hari besar atau agenda tertentu. Komunitas ini memainkan fungsi sosial dalam mempererat interaksi antar masyarakat, sekaligus fungsi ekonomi sebagai pembuka peluang lapangan kerja baru.

Kolongan doro bertransformasi dari hobi menjadi komunitas terorganisir. Perannya tidak sekadar dalam aspek sosial ekonomi, tetapi turut meluas ke ranah

politik. Sebab, keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas dan sosial bisa memberi pengaruh secara tidak langsung dalam konteks politik lokal. Politisi sering memanfaatkan acara seperti lomba merpati kolong untuk mendekati warga, karena komunitas ini memiliki basis massa yang solid. Kehadiran politisi sebagai tamu undangan atau menjadi sponsor lomba adalah cara umum untuk mencuri simpati masyarakat. Simpati ini diharapkan dapat dikonversi menjadi dukungan dan perolehan suara pada saat hari pemilihan. Karena anggota komunitas ini tersebar dari berbagai kalangan, mereka bisa menjadi medium penyebaran informasi atau opini politik dalam bentuk informal. Beberapa tokohnya memiliki pengaruh terhadap suara masyarakat karena mereka dihormati atau dianggap sebagai pemersatu komunitas.

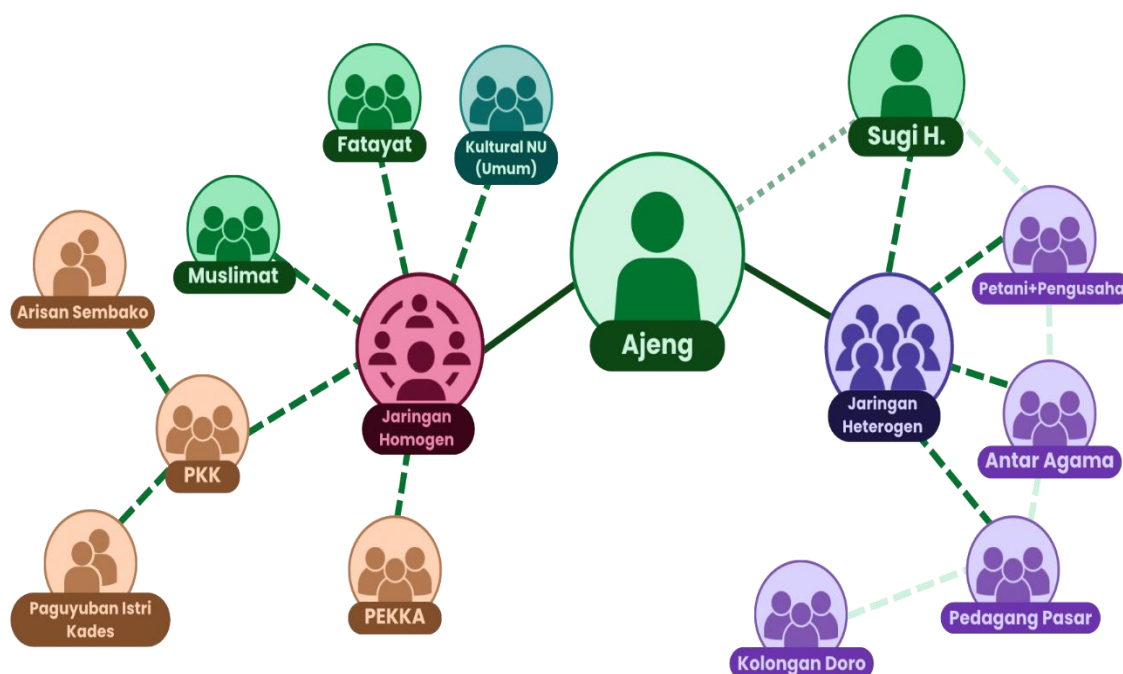
Dalam upaya pemenangan Ajeng, keterlibatan komunitas informal seperti *kolongan doro* ini memainkan peran penting sebagai salah satu kekuatan akar rumput yang tidak bisa diabaikan. Komunitas ini turut memiliki pengaruh di masyarakat. Mereka bisa berperan sebagai agen untuk menggalang dukungan dan memperluas jangkauan kampanye Ajeng ke lapisan-lapisan yang sebelumnya belum tersentuh atau belum terbangun jalinan ikatan jaringannya. Ajeng secara strategis berupaya memperluas jaringan politiknya yang semula didominasi oleh perempuan dan kelompok kultural NU, menjadi lebih inklusif dan heterogen. Transformasi sekaligus perluasan jaringan ini melibatkan berbagai latar belakang sosial, profesi, dan kelompok usia.

Langkah yang ditempuh Ajeng bukan hanya meningkatkan daya jangkau politiknya, tetapi juga menunjukkan resiliensi dan kemampuan adaptasi terhadap

dinamika pemilih yang terus berkembang. Di tengah ketatnya persaingan politik, jaringan-jaringan yang semakin heterogen terbukti mampu menjadi elemen yang efektif untuk memperkuat peran struktur jaringan formal, seperti partai dan institusi, terutama dalam menjangkau pemilih dari berbagai kalangan yang lebih sulit dijangkau menggunakan pola-pola birokratis. Sebab, dinamika dalam konteks politik lokal memerlukan pembacaan sosio-kultural yang lebih jeli. Semakin sengit persaingan, semakin besar pula suara yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan kontestasi. Dari sinilah arti penting membangun jejaring sosial-politik yang cair, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan.

Gambar 3.1.

Ekspansi Jaringan Pemenangan



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Keterangan Garis:

	Relasi dan Koordinasi Kandidat dengan Jaringan Homogen dan Jaringan Heterogen
	Akses Kandidat ke Jaringan Heterogen melalui Suaminya
	Relasi dalam masing-masing Jaringan Homogen dan Jaringan Heterogen
	Keterhubungan dalam Jaringan Heterogen karena Akses dari Suami Kandidat

Keterangan Warna:

	Jaringan homogen, lebih spesifik mengarah pada jaringan homososial yang berisi kelompok perempuan dari berbagai sektor sebagai mesin pemenangan kandidat yang signifikan.
	Jaringan heterogen, berisi kelompok lintas sektor. Ada andil relasi dan peran suami kandidat yang berstatus sebagai kepala desa untuk menghubungkan jaringan. Jaringan ini menandai adanya proses ekspansi dari basis homososial ke heterososial.
	Basis jaringan pemenangan pada periode pertama kandidat mencalonkan diri (Periode 2009).
	Ekspansi segmen ke jaringan perempuan kultural NU sebagai basis pemenangan pada Periode 2014.
	Ekspansi segmen ke jaringan perempuan lintas sektor dan optimalisasi modal simbolik status kandidat sebagai istri kepala desa pada Periode 2019.
	Ekspansi jaringan lintas ragam, lintas sektor, dan lintas kelas pada Periode 2024.